

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2016

THE EFFECT OF LOCAL TAXES, RETRIBUTIONS, BALANCE FUNDS TO THE CAPITAL EXPENDITURES CENTRAL JAVA PROVINCE YEAR 2012-2016

Oleh: **Rachmi Intani**

Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
rachmintani95@gmail.com

Indarto Waluyo, S.E., M.Acc., CPA., Ak.

Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara individu dan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan *ex post facto*. Subjek penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten dan kota. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi APBD tahun 2012-2016. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara individu berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal.

Abstract

The aims of this research to know the effect of Local Taxes, Retribution, and Balance Funds individually and simultaneously to the Capital Expenditures on Regency and Municipality in Central Java Province year 2012-2016. This research is a quantitative research and ex post facto. The subject of this research are regency and municipality government in Central Java Province with total 35 regencies and municipalities. Data used comes from budget outcomes years 2012-2016. The technique of collecting data using documentation method. The test of prerequisite analysis using classical assumption test, those are multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation. The hypothesis test in this research using simple and multiple linear regression analysis. The results of this research showed that there is positive effect of Local Taxes, Retribution, and Balance Funds individually to the Capital Expenditures. There is a positive effect of Local Taxes, Retribution, and Balance Funds simultaneously to the Capital Expenditures.

Keywords: Local Taxes, Retribution, Balance Funds, Capital Expenditures.

PENDAHULUAN

Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998, kondisi pemerintahan cenderung dinamis. Bermunculan terobosan baru dalam pola pemerintahan yang berlaku seperti halnya di Indonesia mulai memasuki era otonomi daerah. Pada tahun 1999 pemerintah melaksanakan reformasi di bidang pemerintah daerah mengenai pelaksanaan desentralisasi pemerintahan dengan diberlakukan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan desentralisasi lebih dikenal dengan kebijakan otonom, karena merupakan wujud dari keinginan rakyat akan keterbukaan informasi publik dan kemandirian daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan memiliki wewenang untuk mengalokasikan pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Pembelanjaan daerah tidak terlepas dari pendapatan daerah yang diterima. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja yaitu

kelompok belanja langsung. Belanja Modal merupakan belanja untuk pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigas dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Mahsun, Sulistiyowati & Andre, 2015: 99). Sumber-sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi Belanja Modal adalah besar kecilnya pendapatan daerah yang diterima. UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pemerintah pusat juga memberikan pendapatan transfer kepada pemerintah daerah berupa Dana Perimbangan.

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat (UU/28/2009). Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU/28/2009). Besarnya sumbangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 masih dibawah 10 persen yaitu 4,41 persen dan 1,93 persen (Data diolah kembali). Hal ini menunjukkan pemerintah daerah belum maksimal dalam menggali potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari masing-masing daerah sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan pendapatan transfer yang bersumber

dari APBN kepada pemerintah daerah berupa Dana Perimbangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal masing-masing daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU/33/2004).

Persentase Dana Perimbangan yang diterima oleh masing-masing daerah di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 masih diatas 50 persen yaitu 61,37 persen (Data diolah kembali). Kondisi ini sejalan dengan pendapat Kadafi (2013) yang menyatakan bahwa kebanyakan daerah memiliki penerimaan yang didominasi oleh sumbangan dan bantuan oleh pemerintah pusat. Sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD khususnya sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun kebanyakan pemerintah daerah masih menggantungkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Dana Perimbangan yang diterima oleh masing-masing daerah diatas 50 persen mengindikasikan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Seharusnya dengan meningkatnya Dana Perimbangan yang diterima, dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan utama dari masing-masing dana tersebut. Selain itu dapat digunakan untuk berbagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya dengan meningkatkan pengalokasian Belanja Modal yang digunakan untuk menjamin tercapainya standar minimum pelayanan publik. Dengan demikian, dalam jangka panjang dapat memperkecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran daerah. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah disebut dengan belanja daerah. Menurut KSAP menyebutkan klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) dikelompokkan menjadi Belanja operasi, Belanja Modal dan Belanja Lain-lain atau tidak terduga. Permasalahan yang kerap terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah mengenai anggaran Belanja Modal adalah proporsi anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Modal lebih rendah dibandingkan dengan belanja operasi. Pada tahun 2014

persentase Belanja Modal terhadap total belanja daerah di provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 10,30 persen, sedangkan persentase belanja operasi terhadap total belanja daerah mencapai 66,49 persen (Data diolah kembali). Hal ini bertolak belakang dengan tujuan pemerintah pusat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, dimana pada tahun 2014 pemerintah pusat menghimbau kepada pemerintah daerah agar persentase Belanja Modal terus ditingkatkan sebesar 30 persen (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, 2013). Meskipun pemerintah pusat telah mendorong untuk meningkatkan persentase Belanja Modal namun pada kenyataannya persentase Belanja Modal masih lebih rendah dibandingkan dengan persentase belanja operasi.

Belanja Modal di Jawa Tengah tergolong rendah seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur, proyek pengadaan berbagai macam sektor, jamkesmas, PNPM dan program sosial lainnya. Belanja Modal (*capital expenditures*) digunakan untuk sumber keuangan dalam pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dengan nilai yang relatif besar dan memiliki masa manfaat yang panjang. Kebijakan Belanja Modal harus

memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset untuk jangka panjang (Priambudi, 2016). Dalam hal ini pengadaan sarana dan prasarana yang termasuk dalam kategori Belanja Modal haruslah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang atau menengah masing-masing daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditunjukkan untuk peningkatan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah. Kestinambungan pembangunan daerah relatif lebih terjamin ketika publik memberikan tingkat dukungan yang tinggi.

Perubahan alokasi belanja juga ditunjukkan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah

daerah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi (Yulianto, 2011). Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mempunyai dampak nyata terhadap kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan kata lain pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada terciptanya kemandirian daerah. Pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan akan mewujudkan terciptanya *good governance*.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sumber-sumber pendapatan daerah yang diterima pemerintah daerah terhadap Belanja Modal. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016”**.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif banyak menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data (analisis) dengan menggunakan data statistik, serta penampilan dari hasil penelitian diwujudkan dalam angka. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian *ex post facto*. Penelitian *ex post facto* yaitu penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi (Widarto, 2013: 2).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten dan Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah dimulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2018 sampai dengan Februari 2018.

Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota.

Prosedur

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan

Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi APBD.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri uji

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji hipotesis menggunakan uji analisis regresi linear sederhana dan uji regresi linear berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberi gambaran atau deskripsi data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Belanja Modal dengan variabel independennya yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
X 1	9.441.19 4	1.006.487. 473	7.680.080, 1	128.427.6 63,9
X 2	6.058.58 1	123.215.0 26	2.610.468, 6	18.058.10 4,2
X 3	387.037. 577	11.952.40 2.950	1.061.977. 220,2	881.449.6 55,7
Y	51.980.7 27	1.349.349. 490	274.278.4 50,3	168.656.8 06,06

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018.

Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Model regresi seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas dengan VIF dan *Tolerance*

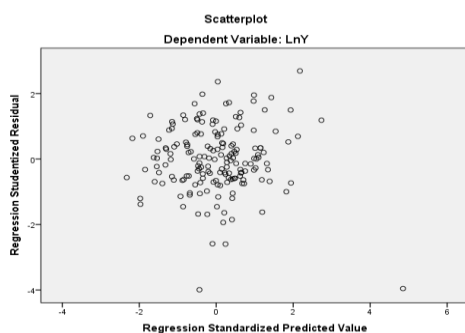
Model	T	Sig.	<i>Collinearity Statistics</i>	
			<i>Tolerance</i>	VIF
(<i>Constant</i>)	,663	,508		
1 LnX1	6,469	,000	,573	1,745
LnX2	1,422	,157	,614	1,630
LnX3	9,825	,000	,841	1,189

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF semua variabel bebas kurang dari 10, dan nilai *tolerance* semua variabel bebas lebih dari 0,10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011: 139). Model regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 1. Grafik *Scatterplot*

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018

Gambar grafik diatas menunjukkan bahwa data penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik pada grafik tersebut tidak membentuk pola tertentu (acak).

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu

pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011: 110).

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi dengan *Durbin Watson (DW- test)*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	DW
1	,759 ^a	,576	,569	,34058	1,877

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa data penelitian tidak terjadi autokorelasi, karena nilai *Durbin Watson* (dw) yaitu 1,877 lebih besar dari nilai (du) yaitu 1,7877 dan lebih kecil dari nilai (4-du) yaitu 2,2123 maka hasilnya $1,7877 < 1,877 < 2,2123$.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Teknik analisis regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis pertama, kedua,

dan ketiga. Hipotesis ketiga diuji menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

Hipotesis 1

Hasil dari pengujian mendukung hipotesis pertamayaitu “Terdapat Pengaruh Positif Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 201-2016”. Pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan persamaan regresinya yaitu:

$$Y = 210.470.083,685 + 0,831 X_1$$

Koefisien regresi (b) X_1 yaitu sebesar 0,831 menunjukkan bahwa jika Pajak Daerah meningkat 1 (satu) satuan maka terjadi perubahan Belanja Modal (Y) sebesar 0,831 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Nilai koefisien korelasi (r_{x1y}) sebesar 0,633 menunjukkan hubungan antara Pajak Daerah dan Belanja Modal adalah positif. Nilai koefisien determinasi (r^2_{x1y}) sebesar 0,400, menunjukkan bahwa 40% Belanja Modal (Y) dipengaruhi oleh variabel Pajak Daerah, sedangkan 60% dipengaruhi oleh variabel lain

yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diah Sulistyowati (2011) dan Hasbullah (2017) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aziz dkk (2000) yang menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah yang dikenal dengan nama *tax-spend hypothesis*. Semakin besar Pajak Daerah yang diperoleh suatu daerah dan pemanfaatan Pajak Daerah yang benar membuat besaran dana yang digunakan atau disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal juga semakin besar.

Hipotesis 2

Hasil pengujian mendukung hipotesis kedua yaitu “Terdapat Pengaruh Positif Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016”. Pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier

seederhana dengan persamaan regresinya yaitu :

$$Y = 152.919.092,162 + 4,649 X_2$$

Koefisien regresi (b) X_2 sebesar 4,649 menunjukkan bahwa jika Retribusi Daerah Laba meningkat 1 (satu) satuan maka Belanja Modal (Y) akan meningkat sebesar 4,649 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Nilai koefisien korelasi (r_{x_2y}) sebesar 0,498 menunjukkan hubungan antara Retribusi Daerah dan Belanja Modal adalah positif. Nilai koefisien determinasi ($r^2_{x_2y}$) sebesar 0,248 menunjukkan bahwa 24,8% Belanja Modal (Y) dipengaruhi oleh variabel Retribusi Daerah, sedangkan 75,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Diah Sulistyowati (2011), menunjukkan bahwa ada hubungan antara Retribusi Daerah dengan Belanja Modal. Semakin tinggi penerimaan Retribusi Daerah, maka Belanja Modal yang dikeluarkan juga akan tinggi. Hal ini menunjukkan Retribusi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Hipotesis 3

Hasil pengujian mendukung hipotesis ketiga yaitu “Terdapat Pengaruh Positif Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tahun 2012-2016”. Pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan persamaan regresinya yaitu :

$$Y = 207.611.876,173 + 0,063 X_3$$

Koefisien regresi (b) X_3 sebesar 0,063 menunjukkan bahwa jika Dana Peimbangan meningkat 1 (satu) satuan maka terjadi perubahan Belanja Modal (Y) sebesar 0,063 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Nilai koefisien korelasi (r_{x_3y}) sebesar 0,328 menunjukkan hubungan antara Dana Perimbangan dan Belanja Modal adalah positif. Nilai koefisien determinasi ($r^2_{x_3y}$) sebesar 0,108 menunjukkan bahwa 10,8% Belanja Modal dipengaruhi oleh Dana Perimbangan, sedangkan 89,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Edwin Kadafi (2013) yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Perimbangan menjadi peran penting untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah yaitu dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif (Halim, 2013: 122).

Hipotesis 4

Hasil pengujian mendukung hipotesis keempat yaitu “Terdapat Pengaruh Positif Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016”. Pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan regresinya yaitu:

$$Y = 0,979 + 0,28X_1 - 0,090X_2 + 0,718X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut menunjukkan koefisien regresi X_1 sebesar 0,28 yang berarti Pajak Daerah (X_1)

meningkat 1 (satu) satuan maka Belanja Modal (Y) akan terjadi perubahan sebesar 0,28 dengan asumsi X_2 dan X_3 tetap. Nilai koefisien regresi X_2 sebesar -0,090 yang berarti Retribusi Daerah (X_2) meningkat 1 (satu) satuan maka Belanja Modal (Y) akan terjadi perubahan sebesar -0,090 dengan asumsi X_1 , dan X_3 tetap. Nilai koefisien regresi X_3 sebesar 0,718 yang berarti Dana Perimbangan (X_3) meningkat 1 (satu) satuan maka Belanja Modal (Y) akan terjadi perubahan sebesar 0,718 dengan asumsi X_1 dan X_2 tetap.

Nilai koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,759 menunjukkan koefisien korelasi tersebut bernilai positif terhadap Belanja Modal. Nilai koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,576 menunjukkan bahwa Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan sebesar 57,6%, sedangkan sisanya yaitu 42,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- a. Terdapat pengaruh positif Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.
- b. Terdapat pengaruh positif Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.
- c. Terdapat pengaruh positif Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.
- d. Terdapat pengaruh Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima.

Saran

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk lebih

memperluas objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah harus dikelola secara optimal dan produktif untuk area belanja seperti Belanja Modal. Pemerintah daerah membuat efisiensi pada program non-prioritas seperti belanja pegawai, belanja operasional sehingga alokasi Belanja Modal lebih besar.

- b. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan adanya penambahan periode pengamatan, menambah cakupan daerah sebagai obyek penelitian agar hasil penelitian selanjutnya lebih representatif, dan menambah variabel lain yang belum diteliti, misalnya dari segi non-keuangan seperti kebijakan pemerintah dalam menyusun anggaran Belanja Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habibullah, W.N.W. Azman-Saini, & M. Azali. (2000). The Causal Relationship Between Tax Revenues and Government Spending in Malaysia. *Pertanika J. Soc. Sci & Hum.* 8(1): 45-50 (2000).
- Ditjen Bina Keuangan Daerah. (2013). "Belanja Modal Pemda Harus Capai 30 Persen". *Artikel*. <http://keuda.kemendagri.go.id/artike>

- /detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen* (diakses tanggal 16 Desember 2017, pukul 14.15).
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2013). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasbullah, R. N. (2017). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2014)". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Kadafi, M.E. (2013). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung)". *Skripsi*. Universitas Widyatama. Bandung.
- KSAP. (2006). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mahsun, M., Sulistyowati F., Andre H. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Priambudi, W. (2016). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013". *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Sulistyowati, D. (2011). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal". *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widarto. (2013). *Penelitian Ex Post Facto*. Makalah disampaikan pada Kegiatan Pelatihan Metodologi Penelitian Pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808327/pengabdian/8penelitian-ex-post-facto.pdf>(diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 10.30).
- Yulianto, Y.A. (2011). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)". *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

